

Daftar Pustaka

- Andrianto, W., & Achmad, A. (2019). Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.
- Andrianto, W., Andaru, D.D.A., & Thalia, P. (2021). Reconstruction of Indonesian government and hospital liability in medico-legal dispute settlement. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(5), 1-11.
- Asyhadie, Z. (2017). *Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Balubun, W.H., Suroto, V., & Sumarwanto, E. (2018). Provisions of Indonesian medical discipline sanctions to protect the rights of patients reviewed from the principle of the establishment of legislation. *SOEPRA*, 4(2), 298-317.
- Hartati, K., Djasri, H., & Utarini, A. (2014). Implementasi tata kelola klinis oleh komite medik di rumah sakit umum daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 17(1), 51-59.
- Haiti, D. (2017). Tanggung jawab dokter dalam terjadinya malpraktik medis ditinjau dari hukum administrasi. *Badamai Law Journal*, 2(2), 206-223.
- Hadjon, P.M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koesnindar, R.E., Santoso, B., & Irawati, I. (2022). Perlindungan konsumen terhadap kenaikan tagihan akibat penambahan kecepatan internet yang dilakukan secara sepihak oleh Indihome. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1-11.

- Komalawati, V., & Kurniawan, D. (2018). Kompetensi dan kewenangan
- Lim, L.T., Chen, W., Lew, T.W.K., Tan, J.M.S., Chang, S.K., Lee, D.Z.W., et al. (2022). Medico-legal dispute resolution: Experience of a tertiary-care hospital in Singapore. *PLoS One*, 17(10), e02761.
- Maulana, A. (2021). Implementasi Hospital Bylaws dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. *Juristic*, 2(3), 236-243.
- Mulyadi, D., Danil, E., Chandrawila, W., & Warman, K. (2020). Medical negligence dispute settlement in Indonesia. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(4), 4229-4233.
- Mardiani, N.S. (2018). Tanggung jawab hukum rumah sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang terhadap proses kredensial tenaga medis. *Aktualita*, 1(2), 661-682.
- Mangkey, M.D. (2014). Perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan medis. *Lex et Societatis*, 2(8), 14-21.
- Novianto, W.T. (2015). Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian malpraktek medik (medical malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 488-503.
- Rewur, E. (2021). Perlindungan dan penegakan hukum bagi dokter yang berhadapan dengan hukum. *Lex Crimen*, 10(6), 63-72.
- Suparman, R. (2020). Perlindungan hukum dan tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter dalam sengketa medis. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 188-215.
- Sulolipu, A.B., & Handoyo, S. (2019). Perlindungan hukum terhadap profesi

dokter dalam penyelesaian sengketa medis berdasarkan prinsip keadilan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 60-82.

Setiawan, L.R.D., Asmara, M.G., & Purnomo, C.E. (2019). Hospital Bylaws: Implikasi penerapannya. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 84-109.

Saptogino, S.H. (2019, March 14). Penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Sengketa Medis*. Retrieved January 5, 2023, from

<https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketamedis-di-indonesia/?lang=id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

https://dpmpt.bantulkab.go.id/ppid/dokumen/files/regulasi_izin/UNDANG_UNDANG_NOMOR_36_TAHUN_2014_TENTANG_TENAGA_KESEHATAN.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun1999_tentang- %24H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun1999_tentang-%24H9FVDS.pdf)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit

https://bandikdok.kemkes.go.id/assets/file/PMK_No_3_Th_2020_ttg_Klasifikasi_dan_Perizinan_Rumah_Sakit.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231620-uu-no-11-tahun-2005-tentang-pengesahan-\\$PXTXO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231620-uu-no-11-tahun-2005-tentang-pengesahan-$PXTXO.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Perumahan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161982/pp-no-47-tahun-2021>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>